MENYOAL *JUDICIALIZATION OF POLITICS* MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX-2022 DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA

Rico Septian Noor, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
DOI: https://doi.org/10.55292/ksz4fj70

Abstract

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia reaffirmed its authority as a definitive judicial institution in testing the results of disputes over Regional Head Elections (Pilkada / Pemilukada) in the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX-2022. This decision has implications for closing the space for the establishment of a Special Judicial Body as mandated by the Regional Elections Law, besides that the decision also has the opportunity to further pull the Constitutional Court into the middle of the Political vortex as part of the Judicialisation of Politics. This paper discusses the Judicialisation of Politics of the Constitutional Court in Indonesia (Implementation and Problematics) and its impact after Decision Number 85/PUU-XX-2022 in the context of Election Law Enforcement in Indonesia. This writing uses the Normative Juridical Research Type by using the Legislation Approach (Statue Approach) and Case Approach (Case Approach) to get a conclusion.

Keywords: Judicialisation of Politics, Constitutional Court, Election Law Enforcement.

@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Abstrak

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kembali meneguhkan kewenangannya sebagai Lembaga Peradilan defenitif dalam pengujian hasil sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada / Pemilukada) pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX-2022. Putusan ini berimplikasi pada tertutupnya ruang bagi Pembentukan Badan Peradilan Khusus sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pemilukada/ Pilkada, selain itu putusan itu juga berpeluang semakin menarik Mahkamah Konstitusi ke tengah pusaran Politik sebagai bagian dari Yudisialisasi Politik (*Judicialization of Politics*). Penulisan ini mengemukakan mengenai Yudisialisasi Politik (*Judicialization of Politics*) Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Implementasi dan Problematikanya) dan dampaknya pasca Putusan Nomor 85/PUU-XX-2022 dalam konteks Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia. Penulisan ini menggunakan Jenis Penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) untuk mendapatkan suatu Kesimpulan.

Kata kunci: Judicialization of Politic, Mahkamah Konstitusi, Penegakan Hukum Pemilu.

Latar Belakang

Mahkamah Konsitusi (dalam penulisan ini disingkat MK) Republik Indonesia pada Tanggal 29 September 2022 lalu menjatuhkan putusan Nomor 85/PUU-XX-2022 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan Pengujian ini diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan

Demokrasi (Perludem) yang diterima oleh Mahkamah pada Tanggal 19 September 2022 lalu. Secara umum para pemohon meminta MK untuk dapat menafsirkan konstitusionalitas pasal 157 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang terkait dengan Pembentukan Badan Peradilan Khusus. Pada akhirnya MK kemudian mengabulkan secara keseluruhan permohonan para pemohon sekaligus secara otomatis menyatakan bahwa MK berwenang kembali mengadili sengketa Pemilukada / Pilkada. Putusan Nomor 85/PUU-XX-2022 ini merupakan bagian dari rangkaian panjang putusan-putusan MK sebelumnya, seperti Putusan Nomor 72-73/PUU-II/2004, Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Jika ditelisik lebih jauh, Putusan Nomor 85/PUU-XX-2022 sejalan dengan Putusan MK Nomor 72-73/PUU-II/2004, dalam pertimbangan putusan tersebut MK secara umum menyatakan bahwa Pilkada/ Pemilukada masuk ke dalam rezim Pemilu sehingga segala permohonan perselisihan tantang hasil Pilkada/ Pemilukada menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sama dengan substansi pada Putusan Nomor 85/PUU-XX-2022. Sebagaimana kewenangan memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada ini pada awalnya berada di Mahkamah Agung lalu kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 072- 073/PUU-II/2004. Adapun Kewenangan MK mengadili sengketa hasil Pemilu dan Pilkada secara transisional dijalankan oleh MK sejak beralih dari Mahkamah Agung pada Tahun 2008 lalu.[1]

Putusan Nomor 85/PUU-XX- 2022 terlihat kontradiktif dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, dimana MK pada saat itu menghapus kewenangan dalam menangani sengketa hasil Pilkada dan MK menyatakan bahwa perluasan dan menambahkan kewenangan dalam mengadili perkara

[1] Baharuddin Riqiey, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022," *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (31 Januari 2023), https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59.

perselisihan hasil Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD Tahun 1945 inkonstitusional. Hal itu disebabkan karena MK menilai rezim Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah adalah dua hal yang berbeda. MK dalam hal ini dapat dianggap melakukan *Judicial Restraint*[2] dan MK mendorong pembentukan Badan Peradilan Khusus, selama belum dibentuk MK bertugas sementara sebagai Badan Peradilan Transisional, namun pembentuk Undang-Undang mengabaikan putusan tersebut dengan tidak membentuk Badan Peradilan khusus sampai saat ini.

Selanjutnya, Putusan MK Nomor 85/PUU-XX-2022 diperkuat dengan keluarnya Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, dimana pada putusan tersebut secara substantive MK memberikan sejumlah model desain Pemilu serentak dimana MK mengemukakan 6 konsep desain penyelenggaraan Pemilu serentak.[3] Dalam pertimbangan putusan MK Nomor 85/PUU-XX-2022, MK menyatakan bahwa pasca lahirnya Putusan MK Nomor 55/PUU- XVII/2019 dan dengan melihat kembali *Original Intent* perubahan UUD Tahun 1945 dimana tidak ada pembedaan rezim pemilihan, sehingga MK menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim Pemilihan baik Pemilu maupun Pemilukada. Hal ini menurut MK berimplikasi pada kewenangan MK sesuai dengan Pasal 22E UUD Tahun 1945 dalam mengadili sengketa Pemilukada / Pilkada.[4] Walaupun hal ini menyiratkan ketidakkonsistenan MK terhadap putusannya, namun MK berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat dimungkinkan dan lazim terjadi terkait dengan perkembangan

[2] Bisariyadi, "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang."

[3] Elisabeth Felita Silalahi, Andina Elok, dan Puri Maharani, "Analisis Putusan Mahkamah KOnstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilohan Umum yang Demokratis" 5, no. 2 (2021): 140–55, https://doi.org/10.20961/respublica.v5i2.58451.

[4] "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX-2022," Pub. L. No. PUTUSAN Nomor 85/PUU-XX/2022 (2022), https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8700_1664446653.pdf.

persoalan ketatanegaraan. Bahkan MK mencontohkan misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi *Common Law*, yang sangat ketat menerapkan *Asas Precedent* atau *Stare Decisis* atau *Res Judicata,* pun telah menjadi praktik yang lumrah dimana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi.[5]

Tarik ulur kewenangan dalam memutus sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah tersebut akhirnya berakhir melalui putusan MK Nomor 85/PUU-XX-2022 dimana MK kembali menegaskan kewenangannya sebagai Lembaga defenitif yang berwenang dalam memutus sengketa Pemilukada / Pilkada. Sebagaimana pertimbangan MK di dalam pertimbangan {3.22} paragraf ketiga "dengan secara tidak langsung menyatakan bahwa kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya "sampai dibentuknya badan peradilan khusus", melainkan **akan bersifat permanen**, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk dan sekaligus memerintahkan pembentuk Undang-Undang untuk menutup rapat asa pembentukan Badan Peradilan Khusus."

Hal ini menjadi bagian penting dan menarik mengingat MK yang berfungsi sebagai *The Final Interpreter of Constitution* (penafsir final konsitusi)[6], dalam putusan ini MK sekaligus juga membuat pertimbangan kebijakan bagi Pemilihan Umum di Indonesia, dimana implikasi putusan tersebut juga menjadi tantangan bagi MK dan berpeluang semakin menarik MK ke tengah pusaran Politik sebagai bagian dari Yudisialisasi Politik (*Judicialization of Politics*). Sebagaimana beberapa kalangan menyebut dengan kewenangan MK memutus perkara perselisihan hasil Pemilu merupakan bentuk *Judicialization of Politics,* maka pasca putusan *a quo* akan menjadi

[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX-2022.

[6] Utami Argawati, "Fungsi MK sebagai Penjaga Gawang Konstitusi," 2022, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792&menu=2.

tantangan bagi MK agar terlepas dari objek politisasi cabang kekuasaan lainnya, sebab pada faktanya pula mekanisme Pemilu / Pemilukada merupakan pintu masuk ke dalam cabang kekuasaan eksekutif maupun legislative bagi para pesertanya. Salah satu buktinya dapat dilihat dari banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu / Pemilukada yang dimohonkan kepada MK.[7]

Menurut penulis ada dua pokok persoalan penting pasca putusan tersebut, Pertama, putusan tersebut semakin memperkuat dan mempertegas kewenangan MK mengadili sengketa Pemilukada / Pilkada sebagai bagian dari Yudisialisasi Politik (*Judicialization of Politics*) oleh MK dan yang kedua, Putusan tersebut tentu berimplikasi pada Penegakan Hukum Pemilu dimana sebelumnya kewenangan tersebut masih bersifat transisional dipegang oleh MK sampai amanat pembentukan Badan Peradilan Khusus diimplementasikan.

Perumusan Masalah

Penulisan ini mengemukakan mengenai 2 buah persoalan yaitu: Pertama, Bagaimana Implementasi dan Problematika Yudisialisasi Politik (*Judicialization of Politics*) MK di Indonesia? dan Kedua, Apa saja dampak Yudisialisasi Politik (*Judicialization of Politics*) MK pasca Putusan Nomor 85/PUU-XX-2022 dalam konteks Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia?

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan Jenis Penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*)[8] dengan Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan kepustakaan (*Library Research*) terhadap bahan hukum primer dari Putusan

[7] Abdurrachman Satrio, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization 0f Politics," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (20 Mei 2016): 117, https://doi.org/10.31078/jk1217.

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2014), 93.

MK, serta bahan hukum sekunder dari sumber literasi Buku dan Jurnal. Namun sebelum melakukan deduksi normative, maka deskripsi terkait dengan Implementasi dan Problematikanya Yudisialisasi Politik (*Judicialization of Politics)* MK di Indonesia perlu dipaparkan terlebih dahulu guna mendapatkan pemahaman yang bersifat mendalam (*deep yet wisely contextual*).[9]

Yudisialisasi Politik *(Judicialization of Politics)* Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Implementasi dan Problematikanya)

Istilah *Judicialization of Politics* atau Yudisialisasi Politik penulis kutip dari istilah yang digunakan oleh Bisariyadi dalam jurnalnya yang berjudul "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang "(*Judicialization of Politics and Judicial Restraint: The Role of the Constitutional Court on the Review of Laws.* Sedangkan Irfan Nur Rahman dalam bukunya yang berjudul "*Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional"* cenderung menggunakan istilah "Politik Hukum Yudisial." Dari kedua istilah yang digunakan tersebut penulis melihat kesamaan konsep yang digunakan yaitu mengenai keterlibatan Lembaga Peradilan dalam pengambilan kebijakan di dalam suatu Negara, sehingga menurut hemat penulis makna *Judicialization of Politics* atau Yudisialisasi Politik atau Politik Hukum Yudisial dapat dipersamakan, demikian halnya di dalam penulisan ini dengan merujuk pada konteks yang sama.

Sebelum Memaparkan Mengenai Praktik *Judicialization Of Politics* Atau Yudisialisasi Politik Mk Di Indonesia, Penulis Akan Menguraikan Terlebih Dahulu Mengenai *Judicialization Of Politics. Judicialization Of Politics* Sendiri Tidak Dapat Dipisahkan Dari Munculnya Konstitusi Liberal Dan Kontrol Konstitusionalitas Hukum, Yang Kemudian Dipaksa Untuk

[9] Otto Kahn-Freud, "On Uses and Misuses of Comparative Law," *Modern Law Review*, 1974, 47, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20880.51200.

Mengubah Peran Hakim Dari Sekadar Pemberi Penjelasan Hukum. *Judicialization Of Politic* Atau Yudisialisasi Politik Dimaknai Ketika Peran Dalam Membuat Kebijakan Dilakukan Oleh Lembaga Peradilan (*Judicial Policy Making*).[10]

Hal ini berasal dari kesimpulan Feeley dan Rubin ketika menganalisa putusan-putusan Mahkamah Agung di Amerika Serikat terkait dengan reformasi kondisi penjara di Amerika pada Tahun 1965 sampai Tahun 1990-an. Dimana peran ini sah dijalankan Pengadilan dan dapat dikatakan termasuk dalam kewenangan peradilan modern.[11] Hal ini juga dipertegas oleh Owen Fiss yang menyatakan bahwa penentuan nilai yang berlaku di masyarakat dapat pula dilakukan oleh fungsi dan peran dari lembaga peradilan tidak hanya dilakukan oleh kekuasaan lainnya.[12]

Oleh Pildes fenomena Yudisialisasi politik disebut juga sebagai "konstitusionalisasi politik demokratis", dengan prinsip supremasi konstitusional sebagai pilar tatanan politik yang akhirnya menjadi arus utama yang kini berkembang ke seluruh dunia setelah awalnya melanda dunia barat dalam 30 tahun terakhir.[13]

Neal Tate juga menyatakan bahwa dalam konstelasi kondisi fasilitatif dan perkembangan faktual yang sangat mendukung dari yudisialisasi politik mengharuskan hakim untuk memiliki preferensi dan sikap yang tepat, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai pembuat keputusan lainnya. Dalam kondisi lain yang mendukung yudisialisasi berkembang, jika hakim memutuskan untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan, paling tidak sesekali, dan juga menggantikan solusi politik yang berasal dari institusi lain.[14]

---

[10] Ary Jorge Aguiar Nogueira, "State of the Art Research in the Judicialization of Politics," *Beijing Law Review* 11, no. 03 (2020): 670–89, https://doi.org/10.4236/blr.2020.113041.

[11] Malcolm M. Feeley dan Edward L. Rubin, *Judicial Policy Making and the Modern State: How The Courts Reformed America's Prisons* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

[12] Owen M. Fiss, "Foreword: The Forms of Justice," *Harvard Law Review* 93 (1979): 1.

[13] R Hirschl, *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism* (Cambridge: Harvard University Press, 2006).

[14] C N Tate, "Why the Expansion of Judicial Power?," in *The Global Expansion of Judicial*

Penyebab umum terjadinya yudisialisasi politik diuraikan oleh John Ferejohn yaitu, pertama peningkatan fragmentasi kekuasaan di dalam cabang-cabang politik dapat membatasi kemampuan badan legislatif untuk membuat Undang-Undang. Masyarakat kemudian mencari penyelesaian konflik melalui lembaga peradilan yang memahami proses hukum yang sering memberikan solusi bahkan bagi kebijakan yang tidak popular.[15] Peran peradilan tersebut akan terlihat ketika lembaga peradilan menjalankan fungsinya dalam menafsirkan nilai-nilai konstitusional, ini sama halnya dengan peradilan sedang menguji kebijakan melalui standar dan ukuran konstitusional dimana terjadi pula persinggungan hukum dan politik di dalamnya. Singkatnya, vallinder menyimpulkan bahwa yudisialisasi pada dasarnya adalah mentransformasikan sesuatu ke dalam bentuk proses peradilan.[16]

Konsep Yudisialisasi Politik (*Judicialization of Politic)* telah banyak ditemukan dalam berbagai konsep mapan mengenai peran Lembaga Peradilan dalam mempengaruhi dan mengubah kebijakan di dalam suatu Negara atau menggunakan pendekatan komparatif di dalam suatu kawasan. Seperti kajian yudisialisasi politik di Asia di Korea Selatan, termasuk di Asia Tenggara seperti di Flipina, di Negara lainnya Amerika Latin, Brazil, Belanda, Israel dan Belanda. Peningkatan kepercayaan terhadap lembaga peradilan terkait urusan politik dan kebijakan publik menjadi perhatian banyak ahli hukum dan iluwan politik sehingga hal ini dikatakan sebagai sebuah fenomena yang seringkali disematkan sebagai *Judicialization of Politics.*[17]

Power, ed. oleh C N Tate dan T Vallinder (New York: NYU Press.h, 1995), 33.

[15] John Ferejohn, "Judicializing Politics, Politicizing Law," *Law and Contemporary Problems* 65, no. 3 (2002): 41, https://doi.org/10.2307/1192402.

[16] T Vallinder, "When the Courts Go Marching," in *The Global Expansion of Judicial Power*, ed. oleh C N Tate dan T Vallinder (New York: NYU Press, 1995), 13–26.

[17] Bisariyadi Bisariyadi, "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (20 Mei 2016): 473, https://doi.org/10.31078/jk1233.

Fenomena ini juga berkaitan dengan fakta di beberapa Lembaga Peradilan di berbagai Negara misalnya Mahkamah Agung di Amerika Serikat yang menilai konstitusionalitas hasil Pemilu di Tahun 2000, MK Afrika Selatan yang menilai perkara terkait Perubahan dan pengesahan konstitusi, MK Jerman menilai kebijakan terkait paket bantuan (*Bailout*) mata uang Euro dan bantuan dana penyelamatan bagi Yunani di Tahun 2010 lalu, di Korea Selatan, dimana MK menolak usulan *Impeachment* (pemakzulan) dari Majelis Nasional terhadap Presiden Roh Moo-hyun di Tahun 2004.[18] Beberapa Putusan tersebut menunjukan bahwa terjadinya peralihan kuasa pengambil kebijakan oleh lembaga peradilan dari lembaga perwakilan. Model seperti ini dimaknai sebagai pengalihan persoalan kontroversial dari lembaga politik ke lembaga Peradilan atau dikenal dengan tren *Juristocracy*. [19]

Menurut Alec Stone Sweet, keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses merumuskan norma dalam putusannya dan dalam *Legislative Process* juga dapat disebut sebagai *Judicialization of Politic* sebagaimana dinyatakan bahwa "*Judicialization of Politics is the Intervention of Constitutional Judges in Legislative, establishing limits on laws making behavior, reconfiguring policymaking enivironments, and sometimes, drafting the precise terms of regulations"* sebagaimana hal ini dapat dilihat pada faktanya putusan Mahkamah Konstitusi seringkali memuat *Guidance* kepada pembentuk Undang-Undang agar dapat mengikuti penafisiran yang telah ditetapkan di dalam putusannya. [20]

Terkait hal tersebut Jimly Asshidiqie juga menyatakan pendapatnya, bahwa saat ini Mahkamah Konstitusi harus

---

[18] Bisariyadi.

[19] R I Maulana dan Y Suwanto, "Paradigma Yuristokrasi: Intervensi Yudisial Atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi Dengan Skema Judicial Review," *Souvereignty* 1, no. 2 (2022): 330–336, https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i2.132.

[20] Alec Stone Sweet, *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe* (New York: Oxford University Press, 2002), 32.

dipandang sebagai lembaga pembentuk hukum selain DPR dan Presiden dan hal ini sebagai suatu konvergensi antar system hukum Karena adanya kecendrungan yang kuat dari Negara-Negara berpaham system *Judge Made Law* dengan memberi peran yang lebih besar pada Undang-Undang layaknya di dalam system *Civil Law* dan sebaliknya di system *Civil Law* adanya keinginan menambah peran pengadilan sebagai instititusi pembentuk hukum. [21]

Seperti halnya di Indonesia dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai pemegang mandat yang menilai konstitusionalitas suatu norma di dalam Undang-Undang terhadap Konstitusi, telah banyak pula putusan MK yang menyatakan suatu materi muatan, ayat, pasal dan juga bagian di dalam Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi sekaligus mengubah kebijakan di dalam Undang-Undang tersebut. Secara Normatif, peran MK sebagai *Negative Legislator* berperan menganulir Norma dalam suatu Undang-Undang, namun seiring perkembangan, MK juga kemudian dapat bertindak sebagai *Positive Legislator* dengan mengubah kebijakan dan merumuskan kebijakan baru dalam upaya perlindungan hak konstitusional warga negara yang hilang maupun dilanggar oleh suatu norma di dalam Undang-Undang.[22] Sebagaimana peran Presiden bersama dengan legislative (DPR) dalam membuat Undang-Undang atau bertindak sebagai *Positive Legislature.* [23]

Hal ini sejalan dengan pendapat Maruarar Siahaan bahwa Putusan MK seringkali memberi arahan, pedoman dan rambu-

---

[21] Jimmly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikirian Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 7.

[22] Bisariyadi, "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang."

[23] Yodi Achmad Kurniawan dan Mukhlis Al Huda, "Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 2723–2328, https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.4013.

rambu yang tegas bagi pembentuk Undang-Undang untuk dapat melakukan perubahan atas Undang-Undang yang diuji sehingga sesuai dengan konstitusi. [24] Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga mendukung pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa putusan MK tidak hanya memiliki kekuatan mengikat dan berlaku untuk umum pada saat dibacakan di dalam siding pleno saja (*ius constitutum*) namun, juga seringkali memberikan arahan bagi pembentuk Undang-Undang arah bagi pembangunan hukum Nasional kedepan (*Ius Constituendum*) sehingga pada konteks itu muncul istilah Politik Hukum Yudisial. [25]

Beberapa contoh Yudisialisasi Politik atau Politik Hukum Yudisial oleh MK di Indonesia, seperti pada putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 terkait Pilkada di Jawa Timur pada Tahun 2008 lalu, dimana pada putusannya MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Sampang, Bangkalan dan Pamekasan Madura. Di lain pihak MK tidak menetapkan hasil penghitungan suara sesuai dengan perhitungan MK dan memerintahkan penghitungan dan pemungutan ulang suara. Putusan tersebut juga menjadi kontroversi karena dianggap telah melampaui kewenangan MK. Namun, MK menegaskan bahwa proses memutus perkara misalnya hasil Pemilukada tidak hanya melihat hasil perhitungan suara saja namun juga wajib menggali keadilan substantive dari perselisihan tersebut.

Contoh lainnya, pada Putusan MK Nomor 102/PUU-VII-2009 yang memperbolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas dalam Pemilu karena warga negara tersebut tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selanjutnya pada Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana

[24] Maruarar Siahaan, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Studi tentang Mekanisme Check and Balances di" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), 405.

[25] NL, "Putusan MK Merupakan Bagian dari Politik Hukum Yudisial," Mahkamah Konstitusi, 2021, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17751&menu=2).

MK memperluas objek kewenangan terkait pemeriksaan pada Praperadilan, seperti penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Kemudian, Putusan Nomor 1 PUU-VII/ 2010 dimana MK mengubah batasan usia anak yang bisa diadili di Pengadilan menjadi 12 tahun dari sebelumnya 8 Tahun. [26]

Selain itu, pembatalan secara keseluruhan suatu Undang-Undang juga pernah dilakukan oleh MK seperti pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Berbagai hal tersebut juga memperlihatkan terjadinya perluasan mekanisme penyelesaian perkara politik melalui forum pengadilan yang mencerminkan kehadiran *Judicialization of Politics* melalui MK di Indonesia dengan dasar menegakkan keadilan substantif. [27]

Pada praktiknya kewenangan MK sebagai bagian dari *Judicialization of Politics* juga bukan tanpa rintangan sebab banyak pula putusan MK yang dianggap melebihi kewenangannya dan diabaikan para *addresat* putusannya.[28] Menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat bahwa bentuk Pengabaian terhadap putusan MK dilakukan dengan 3 cara, yaitu Pertama, tidak menindaklanjuti putusan MK tersebut, Kedua, Pasal-Pasal inkonstitusional tersebut dimuat kembali dan Ketiga, putusan MK dimuat dengan berbeda dari apa yang diputuskan MK.[29] Putusan MK itu diibaratkan seperti "*Macan Ompong*" salah satunya perintah Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013.[30] Putusan

---

[26] Bisariyadi, "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang."

[27] Bisariyadi.

[28] Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 10.

[29] NL, "Putusan MK Merupakan Bagian dari Politik Hukum Yudisial."

[30] Ni`matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

MK Nomor 97/PUU-XI/2013 terkait dengan tafsir MK bahwa Pilkada dan Pemilu termasuk rezim berbeda dan mendorong pembentukan Badan Peradilan Khusus, namun putusan ini diabaikan sampai keluarnya putusan MK Nomor 85/PUU-XX-2022 yang memberikan penegasan terkait Lembaga penyelesai perselisihan hasil Pemilukada. Selain itu beberapa Putusan MK berupa pengabaian dan dianggap melebih kewenangan MK yang dirangkum di dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 1. Putusan MK yang dianggap memperluas kewenangan dan yang diabaikan oleh *Addresat* Putusan

PUTUSAN YANG DIANGGAP MEMPERLUAS KEWENANGAN MK	PUTUSAN YANG DIABAIKAN OLEH PEMBUAT UNDANG-UNDANG
Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, MK dalam hal ini membatalkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi karena dianggap bukan termasuk objek pengawasan oleh Komisi Yudisial artinya MK menolak pembatasan terhadap kewenangannya sendiri. Dalam putusan ini MK juga dianggap melanggar Asas *Nemo Judex In Causa Sua* (Hakim tidak boleh memeriksa perkara yang terkait dengan dirinya sendiri). [31]	Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. MK mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan tafsir konstitusional atas Pasal 22D UUD 1945, akan tetapi dalam Undang-Undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pembentuk Undang-Undang mengabaikan Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 sehingga Undang-Undang MD3 yang baru belum memuat politik hukum. Setelah diuji kembali dan kembali dibatalkan oleh MK. Dalam Putusannya, MK kembali

[31] M.Adnan Yazar Zulfikar, "Politik Hukum dalam Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi, Menuju Juristocracy?," *Padjadjaran Law Review I*, 2013.

	mengutip Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 dan menegaskan kembali tafsir konstitusional atas Pasal 22D UUD 1945. [32]
Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam ASEAN) MK dikatakan telah masuk ke pokok perkara pengujian Undang-Undang tersebut sekaligus MK menyatakan kewenangannya terhadap pengujian suatu perjanjian Internasional yang semestinya bukan objek kewenangan MK dalam pengujiannya. [33]	Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam putusannya MK menegaskan bahwa syarat domisili diperlukan bagi bakal calon anggota DPD. Akan tetapi, syarat domisili ini diubah oleh pembentuk Undang-Undang menjadi syarat bertempat tinggal di wilayah NKRI bagi bakal calon anggota DPD, dan secara tidak langsung hal ini mengingkari putusan MK *a quo*.[34]
Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu. Dalam putusan ini MK juga memperluas kewenangannya dengan menyamakan Perpu dengan Undang-Undang. Padahal jika	Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut Mahkamah, Undang-Undang *aquo* menafikan prinsip persamaan kedudukan di depan hukum (*Equality Before The Law*). Sehingga dinyatakan bertentangan dengan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Namun pembentuk Undang-Undang

[32] Rachman, *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional*, 9.

[33] Zulfikar, "Politik Hukum dalam Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi, Menuju Juristocracy?"

[34] Rachman, *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional*, 8.

dilihat pengaturan konstitusional mekanisme pengujian Perpu harusnya melalui *Legislative Review*.[35]	melakukan perubahan frasa menjadi" persetujuan Majelis kehormatan Notaris" yang substansinya sama sehingga hal ini bertentangan dengan putusan MK serta pembuat Undang-Undang dianggap melakukan penyelundupan hukum. [36]
	Putusan MK Nomor 34/ PUU-XI/2013 terkait dengan pengujian pasal 268 ayat (3) tentang KUHAP oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. MK membatalkan ketentuan pada Pasal 268 ayat (3) KUHAP dimana peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali, namun Mahkamah Agung kemudian abai dan justru mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dengan menegaskan bahwa Peninjauan Kembali dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan satu kali.

Sumber : Diolah dari berbagai Putusan MK oleh Penulis

Berbagai bentuk pengabaian tersebut tentu bertentangan dengan konsep Negara Hukum yang telah lama dianut di Indonesia, karena seharusnya putusan MK wajib dihormati dan pihak-pihak selaku *addresat* putusan wajib mengambil langkah kongkret sejalan dengan amanat di dalam putusan MK yang bersifat eksekutorial tersebut.[37] Implikasi hukum pengabaian

[35] Zulfikar, "Politik Hukum dalam Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi, Menuju Juristocracy?"

[36] Rachman, *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional*, 10.

[37] Bachtiar, *Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*, Cetakan 1 (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 205.

putusan MK tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusi, mencederai hak konstitusioanl warga Negara, perbuatan melawan hukum dan membuat disharmonisasi upaya pembangunan dan pembaharuan system hukum Nasional.[38] Pada faktanya selama ini ketaatan terhadap putusan MK dikatakan hanya didasarkan pada keinginan masing-masih pihak. Selain itu kelemahan MK yaitu tidak memiliki eksekutor bagi setiap putusannya layaknya lembaga eksekutorial seperti Panitera dan juru sita di dalam lingkup Pengadilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini pula yang mengakibatkan MK bahkan disebut sebagai badan yang paling lemah dari keseluruhan organ konstitusi. [39]

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ernest Benda sebagai Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jerman suatu ketika mengatakan bahwa dampak keputusan MK sangat dalam, seperti menentukan nasib warga negara yang menggugat pelanggaran atas hak–hak individunya dan juga berdampak pada kedudukan Pemerintah, Partai politik, parlemen pengadilan dan yang lain sebagai perkembangan politik pada umumnya. Namun kekuasaan tersebut juga tergantung organ / alat pemerintah dalam menerima dan mematuhi seluruh keputusan yang dicapai oleh MK tersebut. [40]

Terkait berbagai problem pengabaian putusan MK dan Perluasan kewenangan Mk tersebut, maka Bachtiar dalam bukunya Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memberikan beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu ***Pertama,*** putusan MK wajib disertai pula dengan *Judicial Order* yang diarahkan pada perorangan atau institusi Negara. ***Kedua,***

---

[38] Rachman, *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional*, 277.

[39] Rachman, 13.

[40] Ernest Benda, *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi, tulisan dalam buku Tugas dan Tantangan MK di Negara-Negara Transformasi dengan contoh Indonesia* (Jakarta: Konrad-Adenauer Stiftung e. V, 2005), 16.

Implementasi putusan final MK memerlukan kerjasama kolaborati antar lembaga Negara. ***Ketiga,*** Putusan MK idealnya mempertimbangkan pula kondisi realitas sosial dan psikologi masyarakat dan terakhir ***Keempat,*** bahwa putusan MK hendaknya didasarkan pada penafsiran yang sejalan dengan isi atau politik hukum di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD Tahun 1945. [41]

Yudisialisasi Politik *(Judicialization of Politics)* MK pasca Putusan Nomor 85 Nomor 85/PUU-XX-2022 dan dampaknya terhadap Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia

Persoalan utama pada putusan MK Nomor 85/PUU-XX-2022 yaitu terkait dengan belum adanya lembaga defenitif bagi penyelesaian perselisihan Pemilukada sebagaimana MK mengamanatkan pembentukan Badan Peradilan khusus, Namun sejak putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 sampai saat ini belum terlihat ikhwal rencana pembentukan Badan Peradilan khusus tersebut terutama dalam menyongsong Pemilu dan Pemilukada serentak di Tahun 2024 mendatang. Hal tersebut pula menjadi persoalan yang didalilkan pemohon pada pengujian perkara Nomor 85/PUU-XX-2022 tersebut, bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hasil ini penting dan sebagai garda terakhir untuk memastikan hasil pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dihasilkan dari suatu penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan sesuai dengan mekanisme yang demokratis. [42]

MK pada akhirnya memutus tarik ulur kewenangan lembaga pemutus sengketa hasil pemilukada tersebut setelah keluarnya Putusan MK Nomor 85/PUU-XX-2022. MK juga kembali memperluas kewenangan dan interpretasi terhadap rezim Pemilukada dan Pemilu dalam satu kesatuan, walaupun

[41] Bachtiar, *Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*, 257.
[42] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX-2022.

Interpretasi Perluasan Kewenangan oleh MK ini banyak diperdebatkan sebagaimana menurut Nikmatul Huda bahwa kewenangan ini hanya didasarkan pada Undang-Undang, sementara kewenangan MK haruslah diatur di dalam UUD 1945. Sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan atau pengurangan kewenangan Lembaga Negara haruslah ditentukan secara tegas dalam UUD 1945 melalui yang namanya amendemen.[43]

Selain itu dikatakan terkait dengan kedudukan MK, sebagaimana ketentuan pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) konstitusi UUD Tahun 1945, maka wewenang MK termasuk ke dalam pengaturan secara *Expressis Verbis, Enumerative* (*limitative)* dimana hanya ditentukan kewenanangannya dalam mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum. Hal ini berimplikasi pula pada kewenangan MK yang diatur secara *limitative* dalam Konstitusi (UUD), maka jika terdapat penambahan wewenang juga harus dituangkan dengan UUD.[44]

Namun, menurut penulis tentu saja keluarnya Putusan MK Nomor 85/PUU-XX-2022 telah dipertimbangakan MK dengan sangat matang (tanpa *Dissenting Opinion*) dan bentuk dari kebebasan penafsiran peraturan oleh MK sebagai *Judicial Activism.*[45] Hal ini tentu dilandasi pula dengan pemikiran *progressif* oleh MK dengan melihat dampak yang luas apabila belum ada kejelasan terkait Badan Peradilan Khusus sehingga dapat mencegah *chaos* di masyarakat, hal ini bertujuan agar putusan MK ini dapat menjamin suatu keadilan substantive

---

[43] Ni'matul Huda, "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 7, No. 5 (20 Mei 2016): 073, https://doi.org/10.31078/jk754.

[44] Hardy Salim dan Cut Memi, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xi/2013 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004)," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (21 Januari 2019): 570, https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2847.

[45] Martitah Martitah, "Progresivitas Hakim Konstitusi dalam Membuat Putusan (Analisis terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislature," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (2012): 315–325, https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.315-325.

sebagai upaya mewujudkan suatu sistem penegakan hukum pemilu yang berkepastian hukum serta mampu memberikan suatu perlindungan hukum, penindakan, dan koreksi atas tingginya dinamika dan banyaknya kepentingan di dalam (Pemilu/ Pemilukada) serentak di Tahun 2024 mendatang. Putusan ini juga sebagai bentuk *Judicialization of Politics* MK, yang termasuk ke dalam dimensi *Interpretive Stabilty* dengan mempertimbangkan pengubahan penafsiran, putusan atau doktrin pengadilan sebelumnya.[46]

Terkait berbagai hal tersebut, maka ada beberapa catatan dan dampak penting pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XX-2022 bagi Penegakan Hukum Pemilu menurut Penulis yaitu:

Pertama, dari sisi substansi hukum, Putusan MK Nomor 85/PUU-XX-2022 telah mempertegas dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat terkait dengan polemik dan diskursus mengenai pembentukan dan ketidakjelasan Badan Peradilan Khusus yang berkembang selama ini, Putusan ini juga memberikan penegasan bagi interpretasi mengenai Pemilu sebagaimana dimaksud di dalam konstitusi, bahwa Putusan ini kembali menegaskan bahwa Pemilu dan Pemilukada termasuk ke dalam rezim yang sama yakni Pemilihan Umum.

Putusan *a quo* selain menutup ruang bagi terbentuknya Badan Peradilan khusus, namun menurut penulis pada sisi lain membuka ruang bagi *adressat* putusan yaitu Pembentuk Undang-Undang untuk menindaklanjuti putusan ini dengan pembuatan atau berbagai perbaikan regulasi salah satunya wacana sentralisasi Sistem Peradilan Pemilu (*Electoral Justice System*) sebagaimana salah satu rekomendasi dari hasil kajian dan evaluative Pengawasan Bawaslu RI pasca Pemilu Tahun 2019 lalu.[47] Karena pada faktanya

[46] Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (1 Januari 2016): 406–30, https://doi.org/10.31078/jk1328.

[47] Ahsanul Minan, *Refleksi system dan praktik Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, *Bawaslu*, 2019.

selama ini konstruksi desain sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia menghasilkan *bottleneck* yang terkesan saling mengunci, sangat rumit dan berlapis-lapis dan hal ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip penegakan hukum pemilu yang cepat, sederhana, bersifat mengikat (*binding*). [48]

Hal ini sejalan dengan pendapat Agus Riewanto yang mengkritisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena cenderung melahirkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih akibat dari putusan antar lembaga peradilan. Agus Riewanto juga menyatakan hal ini diakibatkan banyaknya pintu dalam memperoleh keadilan (*Many Room To Justice*) dan "kegenitan" para pihak yang berperkara dalam menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan kepada seluruh lembaga peradilan dan jalur yang tersedia seperti pintu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini akan menimbulkan tumpang tindih putusan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan terlanggarnya hak peserta Pemilu. [49]

Kedepan, pasca putusan ini maka penegakan hukum Pemilu dapat saja mengacu pada model pemetaan yang dilakukan *International Institute For Democracy and Electoral Assitance* (IDEA) yang menghasilkan pola penegakan hukum Pemilu dimana salah satunya model Penegakan hukum Pemilu yang tersentral di Mahkamah Konstitusi.[50] Ace Project menyebut hal ini sebagai *Austrian Model* dengan memberikan wewenang penyelesaian sengketa Pemilu pada Mahkamah Konstitusi. [51] Sebagai contoh Austria sejak Tahun 1920 lalu menjadi Negara pertama yang

---

[48] Minan.

[49] Agus Riewanto, "Kepastian Hukum Dan Tumpang Tindih Putusan Antar Lembaga Peradilan Dalam Perkara Pemilu.," Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum, n.d.

[50] International IDEA, *Electoral Justice: An Overview of The International IDEA Handbook* (Stockholm, 2010).

[51] Ace Project, "Legal Framework," 2012.

memberikan mandat kepada MK Austria sebagai institusi tunggal dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa Pemilu Presiden dan kongres di level federal. Konstitusinya kemudian memberikan wewenang tambahan dalam penyelesaian perkara pemilu di level daerah.[52]

Kedua, selain itu implikasi lanjutan dari putusan itu khususnya dari sisi kelembagaan penegak hukum kepemiluan, dimana putusan ini memberikan jaminan kepastian hukum terkait lembaga mana yang berwenang memutus perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana Gustav Radbruch menyebut bahwa pentingnya 3 nilai dasar hukum yakni, Keadilan (*Gerechtigkeit)*, Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) dan Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*).[53]Dengan telah jelasnya MK sebagai Lembaga peradilan perselisihan hasil Pemilukada secara otomatis akan memberikan kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi *yustisiable* (para pencari keadilan). [54]

Walaupun dengan catatan, hal ini akan berdampak pada menumpuknya perkara Pemilu dan Pemilukada di MK, sebab perkara perselisihan hasil pemilu dan Pemilukada sejauh ini menurut statistik merupakan perkara yang paling banyak diajukan di MK, dimana untuk sengketa Pemilukada saja terdapat 136 permohonan di Tahun 2020 lalu.[55] Banyaknya perselisihan hasil pilkada yang masuk ke MK tersebut juga disebabkan munculnya anggapan bahwa "apabila kalah dalam pilkada maka dibawa saja ke MK" yang membuat 90% sengketa pilkada berujung di MK.[56]

---

[52] Kurt Richard Luther, *Electoral strategies and performance of Austrian right-wing populism 1986-2006 Working Paper Keele European Parties of Research Unit*, vol. 24 (Keele University, 2007), 32.

[53] Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 45.

[54] Sudikno Mertokusumo, "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

[55] Perludem, "Perludem: Ada 136 Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK," 2021, https://perludem.org/2021/01/13/perludem-ada-136-permohonan-sengketa-pilkada-2020-di-mk/.

[56] Sidik Pramono, ed., *Penanganan Sengketa Pemilu, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia*, *Penanganan Sengketa Pemilu* (Jakarta, 2011), 19.

Dengan asumsi seperti itu, tentu akan membuat tantangan bagi MK dalam penyelesaian perkara, terutama ketika Pemilu serentak di Tahun 2024 nanti perselisihan hasil Pemilu dan Pemilukada akan tersentralisasi di MK, dengan komposisi hakim yang hanya berjumlah 9 orang, serta tenggat waktu dalam penyelesaian perkara yang relative singkat sehingga dapat membuat MK akan kesulitan.[57]Implikasi lainnya dengan menumpuknya perkara tentu akan menimbulkan suatu tantangan bagi Hakim Konstitusi untuk menyeimbangkan antara keadilan, transparansi, serta keterbatasan waktu dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu / Pemilukada. Apabila MK gagal memutus perkara perselisihan hasil pemilu dengan adil dan imparsial tentu hal itu akan menimbulkan dampak politik yang serius. [58]

Terlebih ketika MK nantinya juga akan melakukan yudisialisasi politik (*Yudicialization of Politics*) dengan memperluas objek kewenangannya, sebagai contoh Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang perhitungan suara / kursi tahap 3 yang diajukan Partai Golongan Karya, PAN, PPP, Gerindra dan PKB, pada saat itu MK sama sekali tidak mempersoalkan penetapan suara oleh KPU melainkan Peraturan KPU yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. MK bahkan membuat putusan yang membenarkan dalil para pemohon layaknya pengujian Undang-Undang bukan Putusan hasil Pemilu. Dalam putusan tersebut juga terdapat perluasan makna oleh MK, karena MK juga tidak hanya melihat pada hasil perhitungan suara, namun juga berkaitan dengan pelanggaran dalam proses dan perhitungan suara seperti

[57] Ispan Diar Fauzi, "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 1, no. 1 (3 Desember 2021): 29–42, https://doi.org/10.55108/jap.v1i1.3.

[58] Veri Junaidi dan Jim Della-Giacoma, "Clock Watching and Election Complaint in Indonesia Constitutional Court," n.d., http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/05/20/clock-watching-and-election-complaints-in-indonesias-constitutional-court/.

pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Putusan tersebut kemudian menjadi *Landmark Decision*.[59]

Selain itu terdapat catatan kritis bagi MK, sebagaimana disampaikan Violla Reininda Peneliti dari Kode Inisiatif yang menilai MK bersikap inkonsisten dan terjadi disparitas putusan antara satu daerah lain pada kasus yang sama. Misalnya pada Tahun 2020 lalu, MK memutus 10 Putusan dengan amar ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Putusan tersebut pada Pilkada Kabupaten Belu, Karimun, Konawe Selatan, Kotabaru, Malaka, Solok, Sumba Barat, Sumbawa, Kota Ternate dan Kabupaten Tojo Una-Una. Bahkan dikatakan pada saat itu MK seolah memprediksi perolehan suara dan mengeluarkan penghitungan sendiri yang tidak etis. Pertimbangan seperti ini dikatakan justru membuka ruang atau celah bagi pelanggaran dan kecurangan baru di masa depan dengan mengupayakan terjadinya kecurangan secara parsial terhadap daerah-daerah yang dianggap tidak signifikan mendongkrak suara salah satu pasangan calon.[60]

Ketiga, dari sisi kultur atau budaya hukum, pasca putusan MK Nomor 85/PUU-XX-2022, dimana putusan ini dapat menjadi suatu pedoman agar seluruh entitas terkait penyelenggaraan Pemilu dapat melaksanakan dan mematuhi berbagai aturan Perundangan sehingga setiap masalah Pemilu dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada. Putusan *a quo* menurut penulis sebagai upaya membangun kultur penegakan hukum yang baik, sebab putusan sebelumnya yang diabaikan oleh pembentuk Undang-Undang telah membuat preseden negative dan membangun kultur ketidakpatuhan terhadap putusan MK, karena pembentuk Undang-Undang mengabaikan Putusan

[59] Fernita Darwis, "Pemilihan Spekulatif: Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009" (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011).

[60] "Mahkamah Konstitusi Harus Independen dan Mengedepankan Kepentingan Publik," Mahkamah Konstitusi, n.d., https://www.jentera.ac.id/kabar/mahkamah-konstitusi-harus-independen-dan-mengedepankan-kepentingan-publik.

Nomor 97/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pembentukan Badan Peradilan Khusus bagi Pemilukada sejak 10 tahun lalu.

Sejalan dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang menyatakan bahwa tegaknya hukum dan konstitusi di dalam Negara sangat bergantung pada kehendak dan kesadaran hukum bersama setiap warga negara untuk mentaati aturan bernegara (*the rule of law*). [61] Oleh karena itu, menjadi bagian penting untuk melakukan pembangunan budaya atau kultur hukum dan kesadaran hukum masyarakat termasuk peran serta dan kepatuhan dari seluruh warga bangsa dalam mentaati aturan dan ikut serta mengawasinya.

Putusan MK Nomor 85/PUU-XX-2022 menurut penulis juga hal krusial yang dilakukan MK dengan pertimbangan *impact* yang luas sebagaimana menurut mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva bahwa sengketa Pilkada merupakan sengketa sensitive yang menyangkut keterlibatan publik secara luas dan dapat berdampak pada keseluruhan Demokrasi, oleh karena itu keberhasilan dalam penanganan sengketa Pilkada akan menentukan konsolidasi demokrasi Indonesia di masa yang akan datang. Sehingga memberikan pilihan untuk menempuh proses pengadilan di MK dan menghindarkan kekerasan sengketa Pilkada menunjukan tumbuhnya kesadaran hukum bagi masyarakat dan pelaku politik.[62] Hamdan Zoelva juga menyatakan bahwa etika, moralitas dan hukum penting untuk menjadi pegangan dan rujukan bersama untuk menghindari benturan kepentingan sampai pada kekerasan yang dapat merusak tujuan dari Demokrasi. [63]

---

[61] Anwar Usman, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam membangun peradaban dan ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Hukum yang konstitusional," in *Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), 100.

[62] Hamdan Zoelva, "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (20 Mei 2016), https://doi.org/10.31078/jk1031.

[63] Zoelva, "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi."

Sehingga Putusan yang diambil MK tersebut, menurut penulis merupakan salah satu ikhtiar MK untuk tetap menjaga dan membangun kultur hukum yang baik serta mengisi denyut kehidupan bangsa dengan pemikiran konstitusional. Sebagaimana disampaikan pula oleh Hakim MK, Arief Hidayat bahwa kultur di Indonesia yang di dalamnya terkandung etika dan moral yang belum terbangun dengan baik sehingga ada lubang besar pada penegakan hukum di Indonesia. [64]

Selain itu, dengan mengambil alih kembali kewenangan pasca putusan MK Nomor 85/PUU-XX-2022, maka MK kembali mempertaruhkan reputasi lembaganya dan wajib menjawab keraguan dan tantangan berbagai pihak dengan membangun kultur hukum yang baik pula bagi hakim MK, berkaca pada kasus-kasus negatif MK di masa lalu dengan berpegang teguh pada prinsip independensi dan imparsialitas bagi Hakim dalam mewujudkan Penegakan Hukum Pemilu, sebagaimana salah satu prinsip dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct* yang menyatakan bahwa Independesi Hakim sebagai prasyarat terwujudnya Pengadilan yang adil dan seorang hakim harus menerapkan dan menjunjung tinggi independensi hakim dalam aspek individu dan institusional.[65] Berbagai hal tersebut sejalan dengan beberapa kritik utama terhadap yudisialisasi politik dan aktivisme yudisial biasanya berada pada tiga bidang yang berbeda menurut Santos, Marques dan Pedroso yaitu di bidang legitimasi, kapasitas, dan independensi. [66]

---

[64] Bayu Wicaksono, "Ketua MK: Kultur Hukum di Indonesia Perlu Dibangun," 2017, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13805.

[65] Fahmiron Fahmiron, "Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman," *Litigasi* 17, no. 2 (29 November 2016): 3467, https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158.

[66] B S Santos, M M L Marques, dan J Pedroso, "Os Tribunais Nas Sociedades Contemporaneas," *Revista Brasileira de Ciências Sociais* 30 (1996): 29–61.

Kesimpulan

Penulisan ini menyimpulkan beberapa hal, yaitu ***Pertama,*** terkait dengan Implementasi Yudisialisasi Politik (*Judicialization of Politics*) MK di Indonesia melalui berbagai putusan-putusan MK yang menyatakan suatu materi muatan, ayat, pasal dan juga bagian di dalam suatu Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi sekaligus mengubah kebijakan di dalam Undang-Undang tersebut, dan Problematika terkait Yudisialisasi Politik (*Judicialization of Politics*) MK di Indonesia dapat dilihat dari berbagai perluasan kewenangan MK dan bentuk upaya pengabaian putusan MK oleh *addresat* putusan seperti pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah.

Kedua, dampak Yudisialisasi Politik (*Judicialization of Politics*) Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Nomor 85/PUU-XX-2022 dalam konteks Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia yaitu Pertama, Putusan ini memberikan dampak positif pada substansi hukum Kepemiluan dengan mempertegas dan memberikan jaminan regulasi dan kepastian hukum terkait Lembaga Peradilan Perselisihan Sengketa Hasil Pilkada / Pemilukada, Putusan ini juga menjadi tonggak bagi perubahan dan perbaikan berbagai regulasi Kepemiluan di Indonesia terutama wacara sentralisasi System Peradilan Pemilu, Kedua, dari struktur hukum maka putusan ini mempertegas kewenangan MK sebagai Lembaga defenitif terkait Perselisihan Sengketa Hasil Pemilukada dan melalui kelembagaan yang jelas tentu turut mempengaruhi kultur masyarakat dan pelaku politik terhadap mekanisme yang ada dalam Pemilu / Pemilukada. Ketiga, dari kultur hukum, maka putusan ini sebagai pedoman bagi pembangunan kultur kepatuhan dan kesadaran hukum yang baik (preseden positif) bagi masyarakat, hakim dan seluruh komponen kepemiluan dalam hal ini terkait upaya mencegah ekses negative karena pengabaian putusan yang berdampak pada penegakan hukum Pemilu di Indonesia.

Daftar Pustaka

Jurnal :

Baharuddin Riqiey. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (31 Januari 2023). https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59.

Bisariyadi, Bisariyadi. "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (20 Mei 2016): 473. https://doi.org/10.31078/jk1233.

Fahmiron, Fahmiron. "Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." *Litigasi* 17, no. 2 (29 November 2016): 3467. https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158.

Faiz, Pan Mohamad. "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (1 Januari 2016): 406–30. https://doi.org/10.31078/jk1328.

Fauzi, Ispan Diar. "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 1, no. 1 (3 Desember 2021): 29–42. https://doi.org/10.55108/jap.v1i1.3.

Ferejohn, John. "Judicializing Politics, Politicizing Law." *Law and Contemporary Problems* 65, no. 3 (2002): 41. https://doi.org/10.2307/1192402.

Fiss, Owen M. "Foreword: The Forms of Justice." *Harvard Law Review* 93 (1979).

Huda, Ni'matul. "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (20 Mei 2016): 073. https://doi.org/10.31078/jk754.

Kahn-Freud, Otto. "On Uses and Misuses of Comparative Law." *Modern Law Review*, 1974, 45–55. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20880.51200.

Kurniawan, Yodi Achmad, dan Mukhlis Al Huda. "Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 2723–2328. https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.4013.

Luther, Kurt Richard. *Electoral strategies and performance of Austrian right-wing populism 1986-2006 Working Paper Keele European Parties of Research Unit*. Vol. 24. Keele University, 2007.

Martitah, Martitah. "Progresivitas Hakim Konstitusi dalam Membuat Putusan (Analisis terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislature." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (2012): 315–325. https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.315-325.

Maulana, R I, dan Y Suwanto. "Paradigma Yuristokrasi: Intervensi Yudisial Atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi Dengan Skema Judicial Review." *Souvereignty* 1, no. 2 (2022): 330–336. https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i2.132.

Nogueira, Ary Jorge Aguiar. "State of the Art Research in the Judicialization of Politics." *Beijing Law Review* 11, no. 03 (2020): 670–89. https://doi.org/10.4236/blr.2020.113041.

Salim, Hardy, dan Cut Memi. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xi/2013 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/Puu-Ii/2004)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (21 Januari 2019): 570. https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2847.

Santos, B S, M M L Marques, dan J Pedroso. “Os Tribunais Nas Sociedades Contemporaneas.” *Revista Brasileira de Ciências Sociais* 30 (1996): 29–61.

Satrio, Abdurrachman. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization 0f Politics.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (20 Mei 2016): 117. https://doi.org/10.31078/jk1217.

Silalahi, Elisabeth Felita, Andina Elok, dan Puri Maharani. “Analisis Putusan Mahkamah KOnstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilohan Umum yang Demokratis” 5, no. 2 (2021): 140–55. https://doi.org/10.20961/respublica.v5i2.58451.

Zoelva, Hamdan. “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (20 Mei 2016). https://doi.org/10.31078/jk1031.

Zulfikar, M.Adnan Yazar. “Politik Hukum dalam Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi, Menuju Juristocracy?” *Padjadjaran Law Review I*, 2013.

Buku :

Asshidiqie, Jimmly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikirian Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Bachtiar. *Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*. Cetakan 1. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Benda, Ernest. *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi, tulisan dalam buku Tugas dan Tantangan MK di Negara-Negara Transformasi dengan contoh Indonesia*. Jakarta: Konrad- Adenauer Stiftung e. V, 2005.

Darwis, Fernita. “Pemilihan Spekulatif: Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009.” Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.

Feeley, Malcolm M., dan Edward L. Rubin. *Judicial Policy Making and the Modern State: How The Courts Reformed America's Prisons*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Hirschl, R. *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*. Cambridge: Harvard University Press, 2006.

Huda, Ni`matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

IDEA, International. *Electoral Justice: An Overview of The International IDEA Handbook*. Stockholm, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2014.

Mertokusumo, Sudikno. "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum." Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Minan, Ahsanul. *Refleksi system dan praktik Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu. Bawaslu*, 2019.

Pramono, Sidik, ed. *Penanganan Sengketa Pemilu, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia*. *Penanganan Sengketa Pemilu*. Jakarta, 2011.

Project, Ace. "Legal Framework," 2012.

Rachman, Irfan Nur. *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Rahardjo, Satjipto. "Ilmu Hukum." Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Riewanto, Agus. "Kepastian Hukum Dan Tumpang Tindih Putusan Antar Lembaga Peradilan Dalam Perkara Pemilu." Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum, n.d.

Sweet, Alec Stone. *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe*. New York: Oxford University Press, 2002.

Tate, C N. "Why the Expansion of Judicial Power?" In *The Global Expansion of Judicial Power*, diedit oleh C N Tate dan T Vallinder, 27–39. New York: NYU Press.h, 1995.

Usman, Anwar. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam membangun peradaban dan ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Hukum yang konstitusional." In *Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, 100. Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.

Vallinder, T. "When the Courts Go Marching." In *The Global Expansion of Judicial Power*, diedit oleh C N Tate dan T Vallinder, 13–26. New York: NYU Press, 1995.

Putusan Mahkamah Konstitusi :

Putusan MK Nomor 072- 073/PUU-II/2004

Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006

Putusan MK Nomor 41/PHPU.D- VI/2008

Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008

Putusan MK Nomor 102/PUU-VII-2009

Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009

Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011

Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012

Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012

Putusan MK Nomor 34/ PUU-XI/2013

Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX-2022.

Skripsi/Tesis/Disertasi/Makalah :

Siahaan, Maruarar. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Studi tentang Mekanisme Check and Balances di." Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

Internet :

Argawati, Utami. "Fungsi MK sebagai Penjaga Gawang Konstitusi," 2022. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792&menu=2.

Junaidi, Veri, dan Jim Della-Giacoma. "Clock Watching and Election Complaint in Indonesia Constitutional Court," n.d. http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/05/20/clock-watching-and-election-complaints-in-indonesias-constitutional-court/

Mahkamah Konstitusi. "Mahkamah Konstitusi Harus Independen dan Mengedepankan Kepentingan Publik," n.d. https://www.jentera.ac.id/kabar/mahkamah-konstitusi-harus-independen-dan-mengedepankan-kepentingan-publik.

NL. "Putusan MK Merupakan Bagian dari Politik Hukum Yudisial." Mahkamah Konstitusi, 2021. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17751&menu=2).

Perludem. "Perludem: Ada 136 Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK," 2021. https://perludem.org/2021/01/13/perludem-ada-136-permohonan-sengketa-pilkada-2020-di-mk/.

Wicaksono, Bayu. "Ketua MK: Kultur Hukum di Indonesia Perlu Dibangun," 2017. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13805.